



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PEMUTIHAN IJIN PEMBANGUNAN
MENARA/TOWER DAN/ATAU ANTENA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa rangka penataan, pengendalian dan pemeliharaan keberadaan menara/tower dan atau antena dipandang perlu untuk melaksanakan pemutihan bagi menara/tower dan atau antena yang telah berdiri sebelum tanggal 17 Desember 2007;
- b. bahwa untuk adanya kepastian hukum bagi pembangunan menara/tower dan atau antena yang telah mendapat Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dipandang perlu mendapat proses lebih lanjut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Pemutihan Ijin Pembangunan Menara/Tower dan atau Antena di Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun-bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011-2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar 27);
9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima dan/atau Pemancar Telekomunikasi (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 55);
10. Keputusan Walikota tanggal 18 September 2001 Nomor 578 Tahun 2001 tentang tata Cara dan Persyaratan Pembangunan Menara/Tower, Antena di Kota Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMUTIHAN IJIN PEMBANGUNAN MENARA/TOWER DAN/ATAU ANTENA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Pemutihan Ijin Pembangunan menara/tower adalah ijin yang dikeluarkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Perijinan untuk pembangunan menara/tower sebelum tanggal 17 Desember 2007.
5. Menara penerima dan/atau pemancar telekomunikasi selanjutnya disebut menara adalah seperangkat konstruksi bangunan yang didesain/dibentuk untuk mampu mendukung dengan aman kelengkapan perangkat telekomunikasi.
6. Dinas Perijinan adalah Dinas Perijinan Kota Denpasar.

BAB II

TATA CARA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara

Pasal 2

Pemutihan Ijin Pembangunan Menara/Tower dan atau Antena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi :

- a. pembangunan menara/tower dan atau antena yang telah ada / berdiri sebelum terbitnya Peraturan Gubernur Bali tanggal 17 Desember 2007, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Lokasi Pembangunan Bangunan Menara Penerima dan/atau Pemancar Telekomunikasi;
- b. pembangunan menara/tower dan atau antena tidak berada pada Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK) 0%;
- c. sudah pernah diterbitkan Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) dan atau menara tower dan atau antena yang berdiri atau berada diatas atau menempel pada bangunan yang telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan;
- d. status kepemilikan dan atau penguasaan atas tanah tidak dalam sengketa.

Pasal 3

Pemutihan Ijin pembangunan menara/tower dan atau antena sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak berlaku bagi :

- a. tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan atau berada pada kawasan Rencana Tata Hijau Kota (RTHK) 0%;
- b. bangunan tidak memenuhi syarat teknis untuk mendirikan bangunan menara/tower dan atau antena;
- c. pembangunan menara/tower dan atau antena dapat membahayakan dan atau mengganggu ketertiban umum;
- d. lingkungan pembangunan menara/tower dan atau antena tidak tertata, tidak menunjang estetika dan keindahan kota;

